# ANALISIS DISTRUBUSI PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN TAHUN 2015-2017 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DI LIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu*

*Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*

*Pada Program studi Ekonomi Islam*




oleh :

**ERNIPOPIATI**

**3215.069**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**T.A 2018/201**

## Abstrak

Skripsi ini berjudul **"*Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Pasaman Barat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam"*** di susun oleh **ERNIPOPIATI, NIM 3215.069**. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat atau jurang pemisah (gap) antara si kaya dan si miskin, mengetahui perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015-2017 dan mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap distribusi pendapatan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu data Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran perkapita sebulan selama 3 tahun dari tahun 2015-2017. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koefesien Gini dan Kurva Lorenz.

Hasil penelitian dengan menggunakan Koefesien Gini dan Kurva Lorenz, menunjukkan pada tahun 2015 hasil perhitungan koefesien gini 0,31, pada tahun 2016 0,30, dan pada tahun 2017 0,28. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat tergolong kepada ketidak merataan rendah dimana angkanya berkisar antara 0,20-0,35. Dan hasil dari Kurva Lorenz menggambarkan bahwa distribusi pendapaatn di Kabupaten Pasaman Barat selama 3 tahun dari tahun 2015-2017 terletak tidak jauh dari garis diagonal atau garis kemerataan. Letak kurva ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan distribusi yang rendah hal ini sejalan dengan angka koefesien gini yang cukup rendah dari tahun 2015 sampai 2017.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi.Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dalam penulisan skripsi ini dimudahkan serta dilancarkan selesai sesuai pada waktu yang penulis harapkan. Sholawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **"*Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Pasaman Barat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam*"** ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis sepenuhnya sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak bantuan, bimbingan, dan motivasi dari pihak-pihak, sehingga penulis dapat memecahkan persoalan yang muncul diatasi dengan baik. Selanjutnya melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Rida Ahida M, Hum selaku Rektor IAIN Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

2. Bapak Dr. Asyari, S. Ag, M. Si selaku wakil Rektor IAIN Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak H. Harfandi, SE, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Yefri Joni, MA Ketua Program Studi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap kebijakan yang beliau berikan selama penulis menjadi mahasiswa di prodi Ekonomi Islam.
5. Bapak H. Harfandi, SE, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi
6. Bapak Yuwarman Mansur, SE, MM selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Zulhelmi, SE, MM selaku pembimbing II yang telah sabar memberi bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak atau Ibu dosen Program studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan yang turut memberikan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almarhum Ayah tercinta Sampani dan Ibunda Nurmalis yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan skiripsi.

10. Kakak dan Adik tersayang ( Alfian, Candra, Febri Antoni, Nur Azizah) yang selalu memberikan support dan perhatian yang tulus pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat-Sahabat kecilku yang tersayang ( Eti Anova dewi, Gustirina dan Yopi Elaja ) yang selalu sabar memberikan arahan dan mengingatkan agar selalu tegar dalam menyelesaikan skripsi.
12. Sahabat-Sahabat seperjuanganku (Desi Marlina, Witri Amelia, Findi Fionicha, Rudi Aslan , Medy Mey Yani, Santi Yulia dan Sri Defisa Putri) yang selalu support dan perhatian dan mengingatkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi
13. Teman-Teman KKN Kelompok 155 ( Lasmaini, Rani Zulfani, Siti Khairatih, Romi Eka Putra, Meji Putra, Yeni Fitria, Ernes Dilla Fertika) yang selalu menghibur dan memberikan motivasi disaat penulis jenuh.
14. Teman-Teman kos dari semester 1 sampai sekarang (Sintia Masril, Anggia Nanda putri, Ayu Nanda Mustika, Yeni Marlina, Silvia Ranti, Dola Mela Candra Putri ) yang selalu menghibur dan memberikan motivasi disaat penulis jenuh.
15. Teman-Teman seperjuangan Prodi Ekonomi Islam angkatan 2015 terkhusus kelas EI. B 2015 atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis selama perkuliahan.
16. Kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Kepada semua pihak tersebut penulis mendoakan semoga amal baik yang telah diberikan dapat

diterima dan dilipatgandakan oleh Allah SWT Aamiin Yaa Robbal' Aalamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis menerima semua kritikan dan saran yang membangun untuk itu penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi semua khususnya dalam pelajaran Ekonomi Islam.

Bukittinggi, Mei 2019

**ERNIPOPIATI**

**NIM: 3215.069**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

MOTTO

LEMBAR PERSEMBAHAN SKRIPSI

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... vii

DAFTAR GAMBAR ..... ix

DAFTAR LAMPIRAN ..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 10
C. Batasan Masalah ..... 10
D. Rumusan Masalah ..... 10
E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian ..... 11
F. Penjelasan Judul ..... 12
G. Kajian Terdahulu ..... 13
H. Sistematika Penulisan ..... 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Ekonomi ..... 17
   1. Pertumbuhan Ekonomi ..... 17
   2. Pembangunan Ekonomi ..... 17
B. Distribusi Pendapatan ..... 19
   1. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Islam ..... 24
   2. Tujuan Kebijakan Distribusi Dalam Islam ..... 27
      a. Distribusi Pendapatan Perorangan Atau Ukuran ..... 28

b. Distribusi Pendapatan Fungsional ..... 29
c. Distribusi Pendapatan Relatif ..... 31
d. Distribusi Pendapatan Mutlak ..... 31
C. Distribusi Pendapatan Suatu Negara ..... 31
D. Kesejahteraan Masyarakat ..... 33
E. Indikator Kesejahteraan ..... 34
1. Indikator Moneter ..... 34
a. Pendapatan Perkapita ..... 34
b. Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih ..... 35
c. GDP Dengan Purchasing Power Parity ..... 36
2. Indikator Non Moneter ..... 36
a. Indeks Kualitas Hidup ..... 36
b. Indikator Pembangunan Manusia ..... 37
c. Indikator Sosial ..... 38
d. Indikator Campuran ..... 41
F. Alat Ukur Kesenjangan ..... 42
1. Kurva Lorenz ..... 43
2. Koefesien Gini ..... 45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..... 47
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian ..... 47
1. Lokasi Penelitian ..... 47
2. Waktu Penelitian ..... 47
C. Jenis Dan Sumber Data ..... 48
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 48
E. Teknik Analisis Data ..... 48
1. Koefesien Gini ..... 49
2. Kurva Lorenz ..... 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat ..... 53
1. Keadaan Geografis ..... 53
2. Kondisi Kependudukan ..... 54
3. Keadaan Ekonomi ..... 55
B. Hasil Pengolahan Data ..... 57
1. Hasil Perhitungan Koefesien Gini ..... 57
2. Hasil Kurva Lorenz ..... 60
C. Analisis Penulis ..... 66

1. Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2015-2017 ..... 66

2. Distribusi Pendapatan Menurut Ekonomi Islam ..... 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 71
B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 ..... 6

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 ..... 7

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 ..... 8

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015..... 57

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016..... 58

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017..... 59

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kurva Lorenz Kabupaten Pasaman Barat 2015 ..... 60

Gambar 4.2 Kurva Lorenz Kabupaten Pasaman Barat 2016 ..... 62

Gambar 4.3 Kurva Lorenz Kabupaten Pasaman Barat 2017 ..... 64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing ..... 74
2. Surat Bebas Plagiat ..... 75
3. Surat Keterangan Lulus Semua Mata Kuliah ..... 76
4. Surat Penelitian ..... 77
5. Surat Keterangan Balasan Penelitian ..... 78
6. Surat Bebas Tunggakan SPP ..... 79
7. Kartu Bimbingan ..... 80
8. Sertifikat Opak ..... 81
9. Kartu Hafalan Ayat ..... 82
10. Kartu Seminar Proposal ..... 83
11. Daftar Riwayat Hidup ..... 84

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.[1]

Menurut Lincolin Arsyad tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*trickle down effects*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas.[2]

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar

---

[1]Khairul Amri, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi Di Sumatera,* Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, Volume 1 No 1 Tahun 201, Hal, 1.

[2]Denny Iswanto, *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi,. Vol 4, N0 1, April 2015

pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat di hindari karena adanya efek perembesan kebawah *(trickle down effect)* dari output secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu.[3]

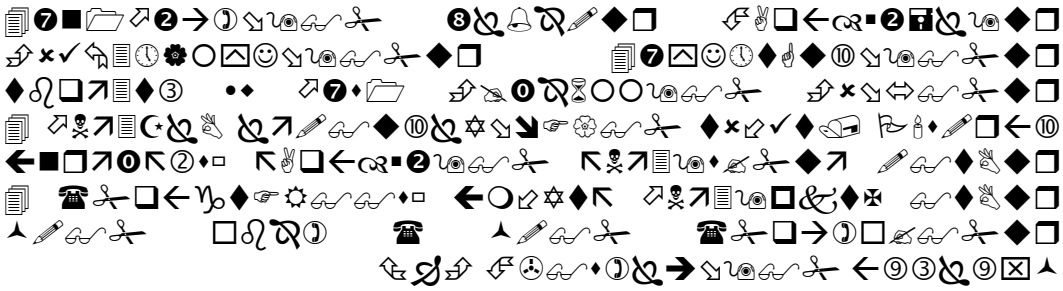
Islam juga memamandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat pada sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu-satunya indeks perencanaan pembangunan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga. Dengan upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu.[4]

Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, *" kekayaan hendaknya tidak terus-menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja".*



[3]e-Jurnal *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* Volume 7 No 1, Januari-April 2018 ISSN: 2303-1255 (Online)

[4]Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, (* Yogyakarta, Graha Ilmu: 2014), Hlm, 243-246.



Artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.* (QS.AL-Hasyr:7).

Makna ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.[5]

Secara teoritis, tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah perekonomian pastilah tidak sama jumlahnya, hal mana disebabkan oleh adanya perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat

[5] *Ecces, Economics, Social, And Development Studies*, Vol. 3 NO. 2, Desember 2016, ISSN 2407-6635

upah dan lain sebagainya. Berbedanya atau tidak sama tingkat pendapatan masyarakat bukanlah masalah dalam perekonomian seandainya saja perbedaan itu berhubungan dengan gaya dan pilihan hidup baik yang diterima secara ikhlas ataupun karena kondisi mengharuskannya demikian. Permasalahannya adalah apabila perbedaan tingkat pendapatan itu sangat timpang, dimana yang memiliki pendapatan tinggi dengan yang memiliki pendapatan sedang atau rendah sangat tidak proporsional dengan jumlah masyarakat yang menjadi penduduk suatu wilayah, dalam arti bila jumlah orang kaya yang berpendapatan tinggi sangat sedikit akan tetapi menikmati sangat banyak hasil produksi, sementara sangat banyak masyarakat yang menikmati sangat sedikit hasil produksi.[6]

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, Daerah ini di bentuk dari hasil pemekaran. Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003, dengan ibu kota Kabupaten di Simpang Ampek, Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor sektor perkebunan Kelapa Sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cacao.[7] Dengan jumlah penduduk 410.307 jiwa pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar (2,16%), 418.785 jiwa pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar (2,07%), dan 427.295 jiwa pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar (2,03%).[8]

---

[6] Iskandar Putong, *Pengantar Mikro Dan Makro*, (Jakarta, Mitra Wacana Media: 2013), Hlm, 303.

[7] Bappeda Pasaman Barat.go.id

[8] *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angkat Tahun 2016-2018*

Sektor Pertanian (pertanian, kehu-tanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015. Ini terlihat dari kontri-businya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 111.247 jiwa dari penduduk yang bekerja. Diikuti oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebanyak 30.477 jiwa dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 12.962 jiwa. Status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh Buruh/ Karyawan/ Pegawai yaitu 40.257 jiwa.[9]

Pada tahun 2017 Sektor Pertanian (pertanian, kehu-tanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Pasaman Barat. Ini terlihat dari kontri-businya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 99.473 jiwa dari penduduk yang bekerja. Diikuti oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebanyak 43.897 jiwa dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 21,784. . Status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh Buruh/ Karyawan/ Pegawai yaitu 49.039 jiwa.[10]

Keragaman dari mata pencaharian penduduk Kabupaten Pasaman Barat dan peningkatan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang diterima. Tinggi atau rendahnya pendapatan  penduduk secara psikologis berhubungan dengan

[9] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2016, Hlm, 49.
[10] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2018, Hlm, 51.

tingkat pengeluaran, artinya bila pendapatannya tinggi maka pengeluarannya semakin tinggi (baik dalam jumlah maupun dalam nilai) karena ini berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tak terbatas itu. Apabila pendapatan rendah maka pengeluarannya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup, jadi pengeluaran untuk bertahan hidup dan pemenuhan kepuasan yang tinggi semuanya karena faktor pendapatan. Seperti yang terjadi di Indonesia Khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Jika di lihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.1**
**Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015**

| Golongan Pengeluaran (Rupiah) | Rata-rata pengeluaran | Persentase Penduduk |
|---|---|---|
| < 150 000 | - | 0,00 |
| 150 000-199 999 | - | 0,00 |
| 200 000-299 999 | 277 012 | 0,99 |
| 300 000-499 999 | 416 386 | 11,74 |
| 500 000-749 999 | 611 777 | 26,67 |
| 750 000-999 999 | 862 974 | 20,68 |
| 1000 000-1499 999 | 1 203 785 | 23,30 |
| >1500 000 | 2 434 071 | 16,62 |
| Jumlah/total | | 100 |

*Sumber: BPS- Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2015, ((Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2016).*

Pada Tabel 1.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Tahun 2015 dapat dilihat bahwa persentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan tertinggi berada pada golongan pengeluaran 500000-749999 yaitu

sebesar 26,67 dari total jumlah penduduk pada tahun 2015, sedangkan persentase penduduk terendah menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan berada pada golongan pengeluran <199999 yaitu sebesar 0,00% atau tidak ada.

**Tabel 1.2**
**Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016**

| Golongan Pengeluaran (Rupiah) (1) | Rata rata Pengeluaran | Persentase Penduduk |
|---|---|---|
| 200 000-299 999 | 277 012 | 0,66 |
| 300 000-499 999 | 416 386 | 16,41 |
| 500 000-749 999 | 611 777 | 31,38 |
| 750 000-999 999 | 862 974 | 20,22 |
| 1000 000-1499 999 | 1 203 785 | 19,77 |
| *S* >1500 000 | 2 434 071 | 11,56 |
| *u* **Jumlah/ Total** | | **100** |

*Sumber: Bps- Survei Ekonomi Nasional Tahun 2016 ( Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018 ).*

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Tahun 2016 dapat dilihat bahwa persentase penduduk tertinggi menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan berada pada golongan pengeluaran 500000-749999 yaitu sebesar 31,38% dari total jumlah penduduk pada tahun 2016, sedangkan persentase penduduk terendah menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan berada pada golongan pengeluaran 200000-299999 yaitu sebesar 0,65%

**Tabel 1.3**
**Persentase Penduduk Menurut Pengeluaran Perkapita Sebulan Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

| Golongan Pengeluaran (Rupiah) (1) | Rata rata Pengeluaran | Persentase Penduduk |
|---|---|---|
| 0-199 999 | - | 0 |
| 200 000-299 999 | 277 012 | 1,86 |
| 300 000-499 999 | 416 386 | 14,45 |
| 500 000-749 999 | 611 777 | 32,64 |
| 750 000-999 999 | 862 974 | 23,78 |
| 1000 000-1499 999 | 1 203 785 | 18,96 |
| >1500 000 | 2 434 071 | 8,31 |
| **Jumlah/Total** | | **100** |

*Sumber: BPS- Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2017, ( Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2018 ).*

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Tahun 2017 dapat dilihat bahwa, persentase penduduk tertinggi menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan berada pada golongan pengeluaran 500000-749999 yaitu sebesar 32,64% dari total jumlah penduduk pada tahun 2017, sedangkan golongan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan terendah berada golongan pengeluaran 0-199999 yaitu sebesar 0,00% atau tidak ada.

Pada Tabel 1.1, 1.2, dan 1.3 diatas dapat dilihat bahwa, Terjadinya kenaikan persentase jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran

perkapita sebulan pada tahun tahun 2016 ( 300 000- 499 999) sebesar 4,67%, Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2016 ( 1000 000- 1499 999 ) sebesar 3,53%, Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2016 ( >1500 000 ) sebesar 5,06%,

Terjadinya kenaikan persentase jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 (200000-299999) yaitu sebesar 1,21%, Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 ( 1000000- 1499999 ) sebesar 0,81%, dan terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 ( >1500000 ) sebesar 3,25%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, dengan judul :

***"Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Pasaman Barat Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam"***

## B. Idenfitikasi Masalah

1. Terjadinya kenaikan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2016 ( 300 000- 499 999) sebesar 4,67%
2. Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2016 ( 1000 000- 1499 999 ) sebesar 3,53%
3. Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2016 ( >1500 000 ) sebesar 5,06%
4. Terjadinya kenaikan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 ( 200 000- 299 999 ) sebesar 1,21%
5. Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 ( 1000 000- 1499 999 ) sebesar 0,81%
6. Terjadinya penurunan jumlah penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2017 ( >1500 000 ) sebesar 3,25%

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada topik yang memang menjadi pokok permasalahan, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2015-2017 di Kabupaten Pasaman Barat

2. Pendapatan perkapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.

## D. Rumusan Masalah

1. Apakah distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat sudah merata atau memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi dilihat dari persentase penduduk menurut golongan pengeluaran perkapita sebulan tahun 2015-2017?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015-2017?
3. Bagaimana distribusi pendapatan menurut persektif ekonomi islam?

## E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan yang ingin di capai peneliti dalam Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2015-2017.

   a. Mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat atau jurang pemisah (gap) antara si kaya dan si miskin di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015-2017
   b. Mengetahui perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman barat pada tahun 2015-2017
   c. Mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap distribusi pendapatan.

2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

a. Menambah wawasan mengenai distribusi pendapatan masyarakat khususnya distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, dengan harapan dapat dilakukannya berbagai studi lebih lanjut dimasa mendatang.

Secara Praktis

a. Untuk memenuhi salah satu syarat terstruktur untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan Pembangunan Ekonomi dan dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Di Kabupaten Pasaman Barat.

## F. Penjelasan Judul

Analisis — Adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat diktahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.[11]

[11] Sudarsono Dan Edilius, *Kamus Besar Ekonomi Uang Dan Bank*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hlm, 15

| | |
|---|---|
| Distribusi Pendapatan | Adalah suatu ukuran yang di gunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang di terima masyarakat.[12] |
| Pendapatan Masyarakat | Yaitu pendapatan bersih masyarakat di tambah dengan upah (dalam jumlah rupiah) keluarga yang layak (pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan UMR), upah tenaga luar dalam bentuk uang atau rupiah dan pajak.[13] |
| Pengeluaran Perkapita | Adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.[14] |
| Ekonomi Islam | Adalah yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilihat oleh nilai-nilai islam di sandarkan berdasarkan |

[12] Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,* Hlm, 243-246.
[13] Jurnal *Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
[14] *Sumber Provinsi Sumatera Barat Dalam Angkat Tahun 2016-2018*

nilai-nilai dalam islam berdasarkan pada Al-Quran dan Hadist. [15].

## G. Kajian Terdahulu

1. Muh.Hamid, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017

   Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Hasil penelitian ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011 angka Indeks Williamson adalah 0,320 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2012 sebesar 0,335 ini menandakan bahwa kurangnya pemerataan antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015 sebesar 0,383 hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan terus melebar. Ketimpangan ini terjadi karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi sektor basis di daerah tertentu, sehingga yang menikmati hasilnya hanya sebagian, serta adanya perbedaan sumber daya alam yang di miliki antar Kabupaten sehingga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur antar daerah.[16]

---

[15] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Geloran Aksara Pratama, 2012) Hlm, 10

[16] Muh.Hamid, Skripsi : *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat*, Uin Alauddin Makassar Tahun 2017

2. Linggar Dewanggara Putra, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011, Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007.[17]
3. Retno Marsanti, Universitas Sanata Dharma Tahun 2007

   Analisis Distribusi Pendapatan Sektor Industri Kecil Studi Kasus Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan sektor usaha kecil yaitu industri kecil pembuat tahu dengan tingkat Ratio 0,13. Usaha kecil pembuat kerak dengan tingkat Ratio 0,19 dan yang terakhir industri kecil pembuat kripik dengan tingkat Ratio 0,15 ketimpangan ini tidak mencolok kparena Gini Ratio yang diperoleh kurang dari 0,4.[18]

## H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan kajian terdahulu.

[17] Linggar Dewanggara Putra, Skripsi: *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007*, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011

[18] Retno Marsanti, Skripsi*: Analisis Distribusi Pendapatan Sektor Industri Kecil Studi Kasus Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten*, Universitas Sanata Dharma Tahun 2007.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, distrbusi pendapatan, jenis-jenis distribusi pendapatan, prinsip dan tujuan distribusi pendapatan dalam islam, distribusi pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat, indikator kesejahteraan masyarakat, alat ukur distribusi pendapatan, koefesien gini dan kurva lorenz.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum Kabupaten Pasaman Barat dan pembahasan hasil analisis dan jawaban yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta beberapa saran masukan bagi pemerintah, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan para Akademisi.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan *output* (pendapatan nasional) yang di sebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebut keberhasilannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang di gunakan istilah pembangunan ekonomi.[19]

### 2. Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya di kaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut: *economic development is growth plus change*-yaitu pembangunan ekonomi adalah petumbuhan ekonomi yang di ikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli

[19]Iskandar Putong, *Pengantar Mikro Dan Makro*...Hlm, 411-412.

ekonomi bukan saja tertarik pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi uga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan.Perbedaan penting lainnya adalah: dalam pembangunan ekonomi tingkat pendapatan perkapita terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu di ikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita.[20]

Dalam Konsep Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefenisikan dengan *a suistained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*. (Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang di maksudkan dalam islam adalah *the process of allaviating proverty and provision of ease, comfort and decency in life* ( proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di

[20] *Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar*, ( Jakarta, Rajawali Pers: 2013), Hlm,423.

dunia. tetapi juga kesejahteraan akhirat. keduanya menurut islam menyatu secara integral ( Mahrusy, 2009). [21]

Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (growth) sangat dibutuhkan. Pada sisi lain, islam juga memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat pada sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perkapita yang tinggi, bukan menjadi tujuan utama. Sebab apalah artinya perkapita tinggi, tapi berbeda sama sekali dengan kondisi riil, kemiskinan menggurita dan kesenjangan tetap menganga. Dengan upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu.[22]

## B. Distribusi Pendapatan

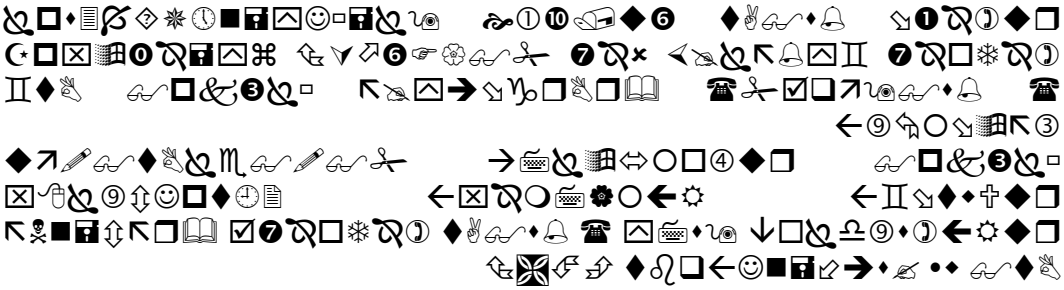
Distribusi pendapatan adalah suatu ukuran yang di gunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang di terima masyarakat. dari perhitungan ini akan dapat di lihat porsi pendapatan nasional yang di kuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat di ketahui apakah ada pendapatan nasional yang hanya dinikmati oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan di antara penduduk di negara tersebut.

---

[21]Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*...hlm, 237.
[22]Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,* Hlm, 243-246.

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pemisah (gap) pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelomppok si kaya dan si miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.[23]

Manusia hidup didunia diberikan tugas dan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi (QS Al-Baqarah: 30).



Artinya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan dengan berbagai perbedaan skill dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang natural. Terjadinya kesenjangan ini karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Berbeda dari sisi kemampuan, ras, suku bangsa, bahasa, bakat, minat, keterampilan, dan

[23]*Ecces, Economics, Social, And Development Studies*, Vol. 3 NO. 2, Desember 2016, ISSN 2407-6635

lain-lain. Perbedaan ini tentu akan melahirkan perbedaan dari sisi kinerja dan performa sebagai manusia.[24]

Dalam islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar dalam sistem distribusi kekayaan. Setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Ajaran islam meyakini bahwa ketidak seimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia.[25]

Menurut Antonio, pada dasarnya islam memiliki dua distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi, diantaranya gaji bagi para pekerja biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melaui proses mudharabah maupun profit sharing (bagi hasil) untuk modal dana melaui profit musyarakah.

---

[24] Irfan Syauqi Beik Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*,( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2017), Hlm, 36.

[25] Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*,( Depok, Rajawali Pers: 2017), Hlm, 96-97.

Adapun sistem yang *kedua*, berdimensi sosial. Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.[26]

Dengan demikian instrumen pendistribusian pendapatan melalui zakat berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial diantara kelompok kaya (muzakki) dan kelompok miskin (mustahik). Implementasi zakat merupakan komitmen yang kuat dan langkah yang kongkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistematik dan permanen, upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi islam.

Selain zakat sebagai instrumen pendistribusian pendapatan yang berdimensi sosial, sistem bagi hasil dan pengembangan institusional baitul mal sebagai pendistribusian pendapatan yang berdimensi ekonomi, sistem ini dapat membangun kerjasama dan persaudaraan antar pemilik modal *(shohib al-mal*) dan pihak yang memiliki skill (*mudhorib*) sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan mengiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan, dan

[26] Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta, Pranadamedia Group: 2015), Hlm,36-37.

profesional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan.[27]

Adelman Dan Moris mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmeratan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

a. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
b. Infalsi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
c. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal ( *Capital Intensive* ). Sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar di bandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Sehingga pengangguran bertambah.
e. Rendahnya mobilitas sosial.
f. Pelaksanaan kebijaksanaan industri subsitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

[27] Kuni Zakiyah, *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam*), Journal Of Islamic Economic, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm, 12.

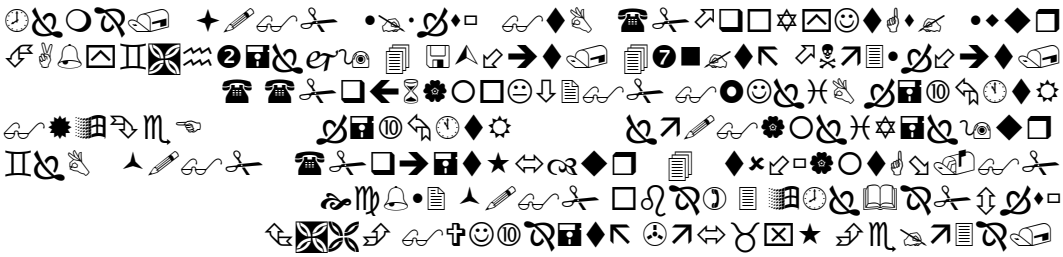
g. Memburuknya nilai tukar ( *term of trade* ) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju.

h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.[28]

**1. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalm Islam**

Prinsip-Prinsip Dari Distribusi Tersebut Antara Lain:

a. Pendapatan (*Return*) yang diterima seseorang sangat bergantung pada usaha yang dilakukannya, sebagaimana firman allah dalam Qs An-Nisa' ayat 32).



Artinya:

> *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

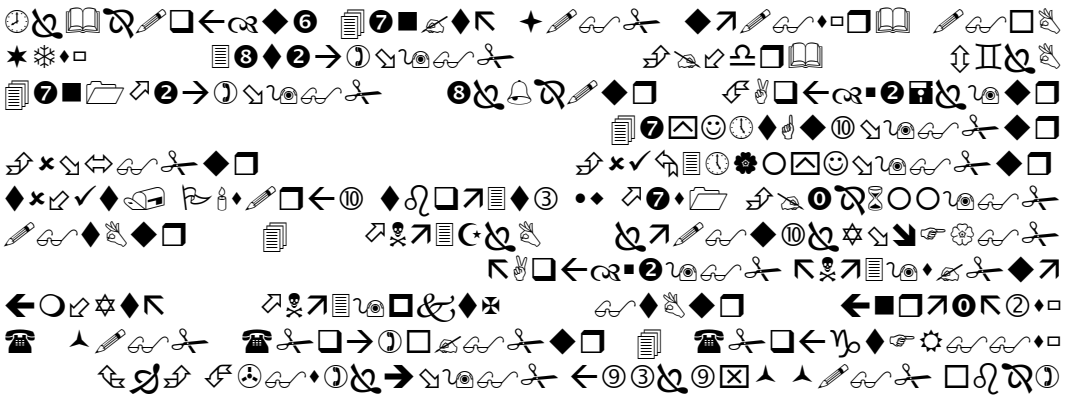
Setiap pendapatan yang diperoleh adalah hasil usaha yang dijalankannya dengan cara yang halal. Termasuk usahanya dalam mensyukuri nikmat, sehingga Allah lipat gandakan kepadanya

[28]Jurnal *Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang,*Hal.61-70.

hasil dari usahanya. Distribusi dilakukan dari sumber-sumber ekonomi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah.

b. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar adalah hak setiap orang. Kategori kebutuhan dasar yang diusung oleh Imam Asy-Syatibi merupakan maqasid as-syariah yang perlu dipenuhi. Pada kebutuhan daruriyat, ada lima kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi karena terkait fitrah sebagai manusia, yaitu nafs (jiwa), din (spritual), aql (intelektual), nasb (keturunan), dan maal (harta). Tingkat kebutuhan selanjutnya adalah hajiyat, yaitu kebutuhan penunjang, seperti laptop bagi mahasiswa dan akademisi. Selanjutnya adalah tingkat tahsiniyat, yaitu kemewahan yang bisa dirasakan, seperti menginap dihotel bintang lima, traveling dengan businessclass.

c. Harta tidak boleh berputar ditangan segelintir kelompok, yaitu kelompok super kaya, allah berfirman dalam Qs Al-hasyr ayat 7.



Artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang*

*dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Harta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Akses terhadap sumber-sumber harta dan kekayaan harus dibuka selebar mungkin dan setiap kelompok dalam masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama. Bahwa nanti kinerja setiap individu akan melahirkan hasil ekonomi yang berbeda, itu tidak menjadi persoalan, selama setiap individu itu diberikan akses dan kesempatan yang sama.

d. Pada harta seseorang, terdapat "bagian" yang menjadi milik mutlak orang lain, yaitu kelompok fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta, sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-Ma'arij ayat 24.



Artinya:

*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,*

Harus selalu diingat bahwa konsep berbagi merupakan jantung ekonomi islam. Bahkan salah satu rukun islam memasukkan komponen ini sehingga statusnya menjadi wajib, yaitu melalui ibadah zakat. Bentuk berbagi lain yang bisa dilakukan seorang muslim adalah Infak, wakaf, hibah, dan waris.

## 2. Tujuan Kebijakan Distribusi Dalam Islam

Adapun Tujuan Kebijakan Distribusi Dalam Islam Adalah Sebagai Berikut:

a. Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, bahwa kebutuhan dasar adalah hak setiap warga masyarakat. Tugas negaralah untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar setiap warga terpenuhi. Selain itu negara juga berkewajiban untuk membangun indikator yang menjadi parameter terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar tersebut.

b. Menjamin Keseimbangan Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan, keseimbangan pendapatan dan kekayaan merupakan kunci stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Tugas negara adalah memastikan bahwa aset dan kekayaan yang ada dinegara tersebut terdistribusi secara adil, proporsional dan merata. Hal ini dapat dilakukan melalui beragam kebijakan yang bisa memastikan bahwa setiap warga negara bisa mengakses sumber-sumber ekonomi ini dengan baik.

c. Mengeliminasi Kesenjangan Ekstrim Antar Kelompok Masyarakat, ini adalah hal yang sangat esensial mengingat kesenjangan yang ekstrim merupakan sumber masalah yang bisa memicu konflik horizontal dan disentegrasi. Secara makro biasnya diindikasikan dengan semakin tinginya nilai indeks Gini

yang digunakan untuk memotret tingkat kesenjangan yang ada. Untuk itu, negara harus menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok kaya pada kelompok miskin, melalui beragam instrumen kebijakan, seperti zakat, pajak, dan lain-lain.[29]

Para ahli ekonomi umumnya membedakan antara dua ukuran pokok dari distribusi pendapatan (sebagai indikator distribusi pendapatan) yang keduanya digunakan untuk tujuan kuantitatif dan analisis yakni :

**a. Distribusi Pendapatan Perorangan Atau Ukuran**

Distribusi pendapatan perorangan atau ukuran ialah yang paling umum digunakan oleh para ekonom. Distribusi ini menyangkut segi manusia sebagai perorangan atau rumah tangga dan jumlah pendapatan yang mereka terima. konsep ini dilakukan oleh keluarga atau perorangan, sedangkan cara untuk mendapatkan pendapatan tersebut tidak dipermasalahkan. juga dipermasalahkan berapa besarnya masing-masing individu atau rumah tangga menerimanya, juga apakah penerimaan tersebut berasal dari bunga, laba, hadiah, atau dari warisan. selanjutnya, tempat, apakah kota atau desa dan sektor yang merupakan sumber penerimaan tersebut. apakah dari sektor pertanian, industri, perdagangan maupun sektor jasa. semuanya diabaikan. Para ahli ekonomi dan statistik meneglompokkan individu-individu

[29] Irfan Syauqi Beik Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*...Hlm, 38-41.

tersebut didasarkan pada pendapatan perorangan dan kemudian membaginya dengan jumlah yang berbeda-beda ukurannya.[30]

Dengan demikian para ekonom para ahli statistik cenderung mengelompokkan masing-masing individu tersebut semata-mata berdasarkan pendapatan yang diterimanya, lantas membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran, lagi-lagi hanya atas dasar besaran nominal. Biasanya, populasi dibagi menjadi lima kelompok biasa disebut kuintil (quintiles), atau sepuluh kelompok yang disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya mereka akan mengitung berapa persen pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemeratan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.[31]

**b. Distribusi Pendapatan "Fungsional"**

Distribusi pendapatan mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah, distribusi pendapatan ini berusaha untuk menjelaskan bagian pendapatan nasional yang masing-masing faktor produksi. Khususnya

[30] Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2004), Hlm, 69.

[31] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta, PT Bumi Aksara: 2000), Hlm, 152.

tenaga kerja. Maksudnya adalah persentase pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja berupa upah dan gaji. Dibandingkan dengan persentase pendapatan yang diterima dalam bentuk i,r,p (interest, rent dan profit). Berapa persen upah yang di terima oleh tenaga kerja dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh investor, penerima sewa dan pemerintah.[32]

Cukup banyak kepustakaan teoritis yang dibangun atas dasar konsep distribusi pendapatan fungsional (*functional income distribution*) tersebut. Masing-masing mencoba menjelaskan besar atau kecilnya pendapatan dari suatu faktor produksi dengan memperhitungkan kontribusi faktor tersebut dalam keseluruhan kegiatan produksi. Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga per unit masing-masing faktor produksi. bila harga-harga unit faktor produksi tersebut dikalikan dengan kuantitas-kuantitas yang bersumber dari asumsi (pendayagunaan) faktor produksi secara efisien (sehingga biayanya berada pada taraf minimum) maka kita bisa menghitung total pembayaran atau pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut. Sebagai (total *wage bill*).[33]

Mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 ( dua ) hal, yaitu:

---

[32]*Ecces, Economics, Social, And Development Studies*, Vol. 3 NO. 2, Desember 2016, ISSN 2407-6635

[33] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*...Hlm,160.

**a. Distribusi Pendapatan Relatif**

Adalah Perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima menggolongkan penduduk penerima pendapatan:

1) 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah.
2) 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah.
3) 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi.

**b. Distribusi Pendapatan Mutlak**

Adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidak merataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidak merataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

## C. Distribusi Pendapatan Suatu Negara

Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam dibangun diatas nilai moral yang mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Adil berarti tidak ada yang menzalimi orang lain dan juga dizalimi

orang lain. suatu negara walaupun pendapatan perkapitanya naik dua kali lipat, akan tetapi jika angka pengangguran tidak berkurang, anka kemiskinan tidak berkurang, dan distribusi pendapatan tidak merata, maka negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakuka pembangunan dengan baik. Strategi pembangunan berbasis islam mengubah paradigma ini dengan menyajikan beberapa elemen penting.[34]

*Pertama*, seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali harus melewati saringan dari dua filter, yaitu: (1) *Mashlahah Sya'iiyah*; dan (2) mekanisme harga pasar. *Kedua*, agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan cara tidak membahayakan linkungan. *Ketiga*, perlu diadakan restrukturisasi dalam bidang sosio ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar dikalangan tertentu, menghapuskan pola konsumsi pamer, hura-hura, dan mereformasi sistem keuangan.

Kemudian sehubungan dengan pembagian barang dan kebajikan, beberapa perkara yang menjadi tujuan dalam islam sebagai berikut:

a. Setiap individu menerima pendapatan sekurang-kurangnya sampai tingkat yang mencukupi kehidupan yang layak.
b. Kekayaan jangan sampai dinikmati oleh segelintir golongan saja.
c. Tidak ada seorang individu pun yang dapat dipakai untuk bekerja melebihi kesanggupannya dalam mendapatkan penghasilan.

[34] Ika Yunia Fauzia, dkk, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ,(Jakarta, Prenada Media Gropu: 2014), Hlm, 156-157.

d. Pemiutang tidak boleh menuntut bunga dari pinjaman yang diberikan

e. Harga hendaknya adil dan sesuai, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah dan hendaklah disesuaikan dengan biaya produksi yang sesungguhnya.[35]

## D. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau negara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.[36] Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan ekonomi, dimana kondisi masyarakat dalam kehidupan yang baik, terpenuhi kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan sosial, serta terjamin dari segi keamanan.[37] Menurut Rambe Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.[38]

---

[35] Ika Yunia Fauzia, dkk, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam ... 2014, Hlm, 157-158

[36] Luqman Khakim *dkk, Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, Hal 281-296

[37] Luh Putu Putri Awandari dkk, *Pengaruh Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*, E-Jurnal EP Unud, Vol 5. No 12, Desember 2016, ISSN: 2303-0178

[38] Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol 9, No 1, Tahun 2017, e-ISSN: 2549-7057|P- ISSN: 2085-8167,Hal, 57.

## E. Indikator Kesejahteraan

### 1. Indikator Moneter

#### a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan NSB. Dalam hal ini pendapatan per kapita selain memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi. Namun demikian, kita harus hati-hati dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, karena pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan riil saja, tetapi kenaikan tersebut harus berkesinambungan dan mantap disertai perubahan-perubahan dalam sikap dan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya menghambat kemajuan-kemajuan ekonomi.[39]

Tetapi apapun kelemahan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan, pendekatan ini tetap memiliki kelebihan di mana pendekatan ini memfokuskan pada *raison d'etre* dari pembangunan yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Atau dengan kata lain pendapatan per kapita bukan suatu proksi (pendekatan) yang buruk dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita masih tetap bisa digunakan sebagai

[39] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.15

titik awal untuk mengklasifikasikan tingkat-tingkat pembangunan dan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan.[40]

Pendapatan perkapita digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita mencerminkan standar hidup riil masyarakat, standar hidup riil masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteran masyarakat.[41] Suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan perkapita menurut harga tetap atau pendapatan perkapita riil terus menerus bertambah dari tahun ke tahun.[42] Pendapatan perkapita merupakan salah satu tanda bahwa rata-rata kesejahteraan masyarakat telah meningkat. Pendapatan perkapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil atau belum.[43]

b. **Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih**

Konsep indikator pembangunan yang lebih baik adalah yang dikemukakan oleh William Nordhaus dan James Tobin (1972) yang mencoba untuk menyempurnakan nilai-nilai GNP dengan dua cara melalui koreksi positif dan negatif yaitu konsep *Net Economic Welfare* (NEW). *Koreksi positif* mengharuskan kita untuk memperhatikan waktu senggang (*leisure*) dan perkembangan sektor

[40] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.15

[41] Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2013), Hlm, 97.

[42] *Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Teori Pengantar*...hlm, 425.

[43] Stefandy Dengah, *Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi, Volume 14 No 3, Oktober, Tahun 2014, Hal 75.

ekonomi informal. Waktu senggang ini berkaitan dengan jumlah jam kerja kita selama seminggu. Misalnya kita merasa menjadi lebih kaya, maka mungkin kita akan memutuskan untuk bekerja lebih singkat dalam seminggu, dengan harapan akan memperoleh kepuasan batin dari adanya tambahan waktu senggang tersebut. Kepuasan dari waktu senggang itu diharapkan akan sebesar kepuasan yang diperoleh dari barang dan jasa yang biasanya dihasilkan. Oleh karena itu GNP pun akan turun walaupun tingkat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian agar kepuasan batin itu ikut diperhitungkan maka suatu koreksi harus ditambahkan pada GNP dan akan Menghasilakan *Net Economic Welfare* (NEW).[44]

c. **GDP dengan Purshasing Power Parity**

Pendapatan perkapita yang telah disesuaikan dinamakan pendapatan perkapita berdasarkan persamaan daya beli, (pendapatan perkapita –ppp) atau perkapita PPP-Purschasing Power Parity. Pendaptan perkapita yang dihitung menurut cara yang biasa dinamakan pendapatan perkapita nominal (per kapita GDP nominal).[45]

**2. Indikator Non Moneter**

**a. Indeks Kualitas Hidup**

IKH atau Physical Quality of life index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran

[44] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.18-1.19.

[45] Sadono Sukirna, *Makro Ekonomi Teori Dan Pengantar*...Hlm,429

tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial.

Indeks ini dihiung berdasarkan kepada:

1) Angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun
2) Angka kematian bayi
3) Angka melek huruf

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambar status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung bersosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembagunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi pendidikan para anggotanya.[46]

**b. Indeks Pembangunan Manusia**

Sejak tahun 1990 *United Nations For Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human *Development Index*, HDI). Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah (1) tingkat harapan hidup, (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan (3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli

[46] Rowland B.F. Pasaribu, Bab 2 Indikator Pembangunan, Hal, 18.

masing-masing negara. Indeks ini besarnya antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti indeks pembangunan manusia semakin tinggi, dan demikian sebaliknya.[47]

**c. Indikator Sosial**

Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan terdapat tiga kelompok yang memelopori usaha tersebut. Kelompok *Pertama* di pelopori oleh Colin Clark yang selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis, yang membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Kelompok kedua, membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Dan kelompok ketiga yang dipelopori oleh Bennet yang berusaha membuat perbandingan tingkat kesejahteraan di setiap negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter (*non monetary indicators*) seperti jumlah kendaraan bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah.

Backerman menemukan cara lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai negara yaitu dengan membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter untuk menentukan indeks kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara. Cara

[47] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.21.

tersebut dinamakan indikator non moneter yang disederhanakan (*modified non monetary indicators*).

Berdasarkan cara tersebut indeks kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh tngkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB yang meliputi data:

1) Konsumsi baja per tahun
2) Konsumsi semen per tahun
3) Surat dalam negeri dalam satu tahun
4) Persediaan pesawat radio
5) Persediaan telepon
6) Persediaan berbagai jenis kendaraan
7) Konsumsi daging per kilogram pertahun

Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara telah dilakukan pula oleh *United Nations Research Institute for Social Development* (UNRISD) yang berpusat di Jenewa, pada Tahun 1970. Dalam penelitian tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari negara-negara maju dan NSB berdasarkan kepada sifat dari 18 jenis data berikut di tiap-tiap negara.

1) Tingkat harapan hidup (*life expectancy*).
2) Konsumsi protein hewani per kapita.

3) Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah.

4) Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.

5) Jumlah surat kabar.

6) Jumlah telepon.

7) Jumlah radio.

8) Jumlah penduduk di kota-kota yang berpenduduk 20.000 jiwa atau lebih.

9) Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.

10) Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi.

11) Persentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang mempunyai pekerjaan) yang memperoleh gaji.

12) Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri pengolahan (*manufacturing*).

13) Konsumsi energi per kapita

14) Konsumsi listrik per kapita

15) Konsumsi baja per kapita

16) Nilai per kapita perdagangan luar negeri

17) Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki disektor pertanian

18) Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB)

Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indakator kesejahteraan dan pembangunan maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka masing-masing.[48]

**d. Indikator Campuran**

Pada tahun 1992 Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang disebut indikator Susenas Inti (*Core Susenas*). Indikator Susenas Inti ini merupakan indikator ”campuran” karena terdiri indikator sosial dan ekonomi. Indikator Susenas Inti ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1). Pendidikan

Indikatornya adalah tingkat pendidikan, tingkat melek huruf,dan tingkat partisipasi pendidikan.

2). Kesehatan

Indikatornya adalah rata-rata hari sakit, fasilitas kesehatan.

3). Perumahan

Indikatornya adalah sumber air bersih dan listrik, sanitasi dan mutu rumah tinggal.

[48] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.19-1.21.

4). Angkatan Kerja

Indikatornya adalah partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja, sumber penghasilan utama, dan status pekerjaan.

5). Keluarga Berencana Dan Fertilitas

Indikatornya adalah penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kelahiran tenagakesehatan pada kelahiran, dan penggunaan alat kontrasepsi.

6). Ekonomi khususnya tingkat konsumsi perkapita.

7). Kriminalitas

Indikatornya adalah jumlah pencurian per tahun.

8) Perjalanan wisata, dengan indikator: frekuensi perjalanan wisata per tahun

9) Akses ke media massa, dengan indikator; jumlah surat khabar, jumlah radio, dan jumlah televisi.[49]

**F. Alat Ukur Kesenjangan**

Instrumen yang sering dijadikan sebgai alat untuk mengukur tingkat kesenjangan adalah Lorenz Curve dan Gini Ratio, meskipun ada juga alat ukur tambahan seperti Atkinson Index. Meski alat-alat ukur tersebut sangat umum digunakan dalam disiplin ekonomi konvensional, namun masih bisa digunakan dalam disiplin ekonomi pembangunan syariah karena instrumen tersebut tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah.

[49] Hermanto Siregar dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*, hlm, 1.21-1.22.

**1. Kurva Lorenz**

Kurva lorenz adalah kurva yang menghubungkan antara kelompok populasi (sumbu horizontal) dengan kelompok pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dapat diketahui proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok populasi tertentu. Dalam kurva Lorenz ditunjukkan bagaimana hubungan rasio Gini dengan distribusi pendapatan secara visual. Semakin sempit luas daerah A.[50] Caranya adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu pendapatan seluruh populasi yang kecil hingga tertinggi.[51]

Pengukuran Tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva lorenz itu berada. rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A yang diarsir terhadap total segitiga OPE. Rasio inilah yang dikenal sebagai Rasio Konsentrasi Gini yang seringkali disingkat dengan istilah Koefesien Gini yang diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

$$\text{Koefesien Gini} = \frac{\text{Bidang A yang diarsir}}{\text{Total Luas Bidang OPE.}}$$[52]

[50] Sugiyarto, Dkk, *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro,* Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2, Desember 2015, Hlm, 117.

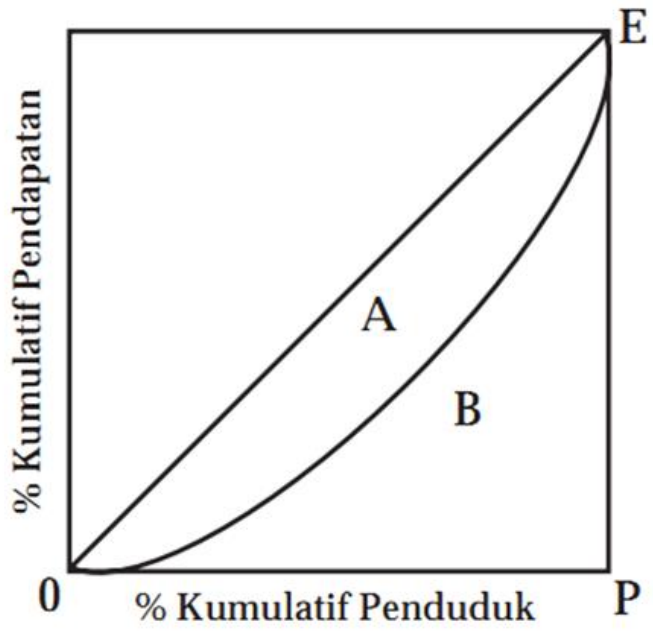
[51] Irfan Syauqi Beik Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Ragagrafindo Persada, Thn 2017), Hlm, 59-61.

[52] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*...Hlm,159.

Keadaan pembagian pendapatan itu digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut kurva lorenz (*lorenz curve*). Di dalam kurva lorenz ini digambarkan tiga keadaan sekaligus:

a. Distribusi pendapatan nasional yang sangat merata (*absolute equality income distribution*)
b. Distribusi pendapatan nasional yang sangat tidak merata atau sangat timpang (*absolute inequality income distribution*)
c. Distribusi pendapatan nasional yang aktual, yang sesuai dengan kenyataan tidak (pernah) merata (*actual inequality in distribution*)

Gambar Kurva Lorenz




Distribusi pendapatan nasional yang merata mutlak dilukiskan oleh garis OE ( yang disebut engalitarian line ). Di sini, pendapatan semua keluarga sama. Kurva siku OPE menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang timpang sempurna atau timpang mutlak.

Disini semua keluarga miskin kecuali sekelompok kecil saja. Kedua keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dimanapun juga. Garis yang menunjukkan distribusi aktual OBE.[53] Garis diagonal OE menunjukkan distribusi yang merata, semakin kurvanya mendekati garis diagonal, maka kesenjangan semakin kecil. Sebaliknya, semakin menjauh, maka kesenjangan semakin besar.

2. **Koefesien Gini**

Koefesien Gini adalah sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan kesejahteraannya dikalangan pendududuknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling merata, berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,35.[54] Menurut **Arsyad,** angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan ketidakmerataan tinggi.[55] Rumus

$$GR = 1 - \sum_{k-1}^{n} (Xk - Xk\text{-}1)\,(Yk + Yk\text{-}1)$$

[53] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*,(Jakarta, Raja Wali Pers: 2014)hlm, 151-152.

[54] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*...hlm, 159.

[55] Wahyuni Dkk, *Jurnal Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Gapoktan Tunas Berduri Penerima Dana PUAP di Desa KUALU NANAS Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, ISSN 2087-409X, Tahun 2012, Hal:94

dimana,

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

Xk: proporsi komulatif dari jumlah rumah tangga, untuk k=0....,n, dengan X0=0, Xn=1

Yk : adalah proporsi komulatif dari jumlah pengeluaran rumah tangga sampai kelai ke-k, untuk k=0....,n, dengan Y0=0, Yn=1.[56]

Nilai Gini Ratio terletak antara 0-1, dengan kriteria:

Bila GR = 0 artinya ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satukelompok saja.

Bila GR = 0 atau GR = 1 tidak pernah diperoleh di lapangan. Gini.[57]

---

[56] Pramono Hariadi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan"Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*", Tahun 2008, Hlm, 7.

[57] Artha Novelia Sipayung, dkk, *QE Journal*, *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumahtangga* (Studi Kasus: Kecamatan Percut Sei Tuan)│Vol.04 - No.03 September 2015 , Hlm, 161-162

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data dalam bentuk numerik/angka. Pada dasarnya, pendekatan ini menggambarkan data dalam bentuk angka-angka, seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan dan lain sebagainya.[58] Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat serta perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

## B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian ini di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

2. Waktu Penelitian

   Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini ± 2 bulan mulai November 2018 sampai selesai penelitian, karena penelitian ini hanya menggunakan data sekunder.

---

[58] Suryani, Dkk, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm, 109.

## C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.[59] Data ini biasanya sudah dalam bentuk publikasi[60] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Tahun 2015-2017 yang bersumber dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS) Dalam Bentuk Naskah Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2015-2017.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Koefesien Gini dan Kurva Lorenz

---

[59] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuatitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm124

[60] Suryani, Dkk, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*...hlm,171.

**1. Koefesien Gini**

Koefesien Gini adalah sebuah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan kesejahteraannya dikalangan pendududuknya dikenal tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal relatif paling merata, berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,35.[61] Menurut **Arsyad,** angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan ketidakmerataan tinggi.[62] Rumus

$$GR = 1 - \sum_{k-1}^{n} (Xk - Xk\text{-}1)\,(Yk + Yk\text{-}1)$$

dimana,

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

Xk: proporsi komulatif dari jumlah rumah tangga, untuk k=0....,n, dengan X0=0, Xn=1

[61] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*...hlm, 159.

[62] Wahyuni Dkk,*Jurnal Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Gapoktan Tunas Berduri Penerima Dana PUAP di Desa KUALU NANAS Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, ISSN 2087-409X, Tahun 2012, Hal:94

Yk : adalah proporsi komulatif dari jumlah pengeluaran rumah tangga sampai kelai ke-k, untuk k=0....,n, dengan Y0=0, Yn=1.[63]

Nilai Gini Ratio terletak antara 0-1, dengan kriteria:

Bila GR = 0 artinya ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satukelompok saja.

Bila GR = 0 atau GR = 1 tidak pernah diperoleh di lapangan. Gini.[64]

**2. Kurva Lorenz**

Kurva lorenz adalah kurva yang menghubungkan antara kelompok populasi (sumbu horizontal) dengan kelompok pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dapat diketahui proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok populasi tertentu. Dalam kurva Lorenz ditunjukkan bagaimana hubungan rasio Gini dengan distribusi pendapatan secara visual. Semakin sempit luas daerah A.[65] Caranya

---

[63] Pramono Hariadi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan"Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*", Tahun 2008, Hlm, 7.

[64] Artha Novelia Sipayung, dkk, *QE Journal*, *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumahtangga* (Studi Kasus: Kecamatan Percut Sei Tuan)│Vol.04 - No.03 September 2015 , Hlm, 161-162

[65] Sugiyarto, Dkk, *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro*, Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2, Desember 2015, Hlm, 117.

adalah dengan mengurutkan terlebih dahulu pendapatan seluruh populasi yang kecil hingga tertinggi.[66]

Pengukuran Tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva lorenz dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva lorenz itu berada. rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A yang diarsir terhadap total segitiga OPE. Rasio inilah yang dikenal sebagai Rasio Konsentrasi Gini yang seringkali disingkat dengan istilah Koefesien Gini yang diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yang pertama kali merumuskannya pada tahun 1912.

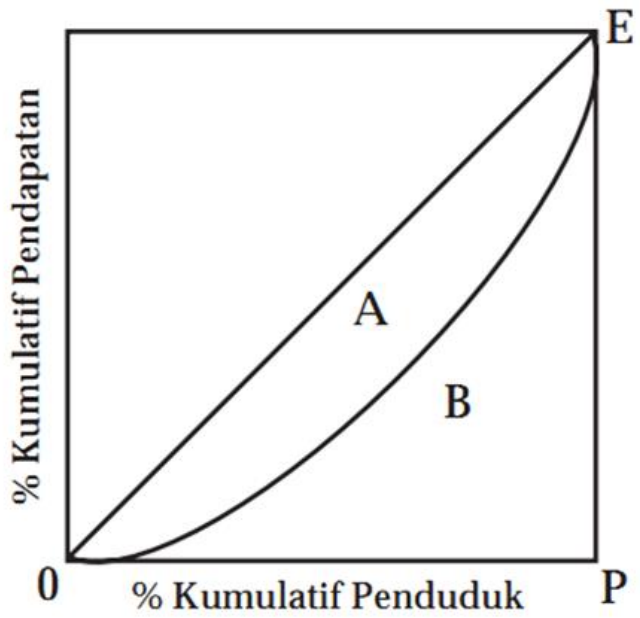
$$\text{Koefesien Gini} = \frac{\text{Bidang A yang diarsir}}{\text{Total Luas Bidang OPE.}}$$[67]

Keadaan pembagian pendapatan itu digambarkan dalam sebuah kurva yang disebut kurva lorenz (*lorenz curve*). Di dalam kurva lorenz ini digambarkan tiga keadaan sekaligus:

d. Distribusi pendapatan nasional yang sangat merata (*absolute equality income distribution*)
e. Distribusi pendapatan nasional yang sangat tidak merata atau sangat timpang (*absolute inequality income distribution*)
f. Distribusi pendapatan nasional yang aktual, yang sesuai dengan kenyataan tidak (pernah) merata (*actual inequality in distribution*)

[66] Irfan Syauqi Beik Dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: PT Ragagrafindo Persada, Thn 2017), Hlm, 59-61.
[67] Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi*...Hlm,159.

Gambar Kurva Lorenz




Distribusi pendapatan nasional yang merata mutlak dilukiskan oleh garis OE ( yang disebut engalitarian line ). Di sini, pendapatan semua keluarga sama. Kurva siku OPE menunjukkan distribusi pendapatan nasional yang timpang sempurna atau timpang mutlak. Disini semua keluarga miskin kecuali sekelompok kecil saja. Kedua keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dimanapun juga. Garis yang menunjukkan distribusi aktual OBE.[68] Garis diagonal OE menunjukkan distribusi yang merata, semakin kurvanya mendekati garis diagonal, maka kesenjangan semakin kecil. Sebaliknya, semakin menjauh, maka kesenjangan semakin besar.

[68] Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*,(Jakarta, Raja Wali Pers: 2014)hlm, 151-152.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis Khatulistiwa yang terletak antara 0033' Lintang Utara - 0011' Lintang Selatan dan antara 99010'- 100004' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 Km2 atau 9,99% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat serta memiliki luas lautan seluas 800,47 Km2 dengan panjang garis pantai 152 km. Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 - 2.912 m di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 m di atas permukaan laut. Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat Berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara (Utara), Kabupaten Pasaman (Timur), Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman (Selatan) dan Samudera Indonesia (Barat). Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan.

Kecamatan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman dengan luas 508,93 Km2 (13,09 %). Dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan wilayah yang terkecil yakni tercacat hanya 123,71 Km2 (3,18 %). Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pasaman Barat di lewati sejumlah aliran sungai

yaitu sebanyak 147 aliran sungai. Beberapa nama sungai adalah adalah Batang Pasaman, Batang Toman dan Batang Masang. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung diantaranya adalah Gunung Pasaman, Gunung Talamau dan Gunung Malintang.[69]

**2. Kondisi Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2015 berjumlah sebanyak 410.307 jiwa dengan komposisi 207.210 jiwa laki-laki dan 203.097 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas ) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 73.101 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 70.350 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 46.839. sedangkan kecamatan sasak ranah pasisia dengan jumlah penduduk 14.486 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman Barat.[70]

Pada Tahun 2016 berjumlah sebanyak 418.785 jiwa dengan komposisi 211.582 jiwa laki-laki dan 207.203 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas ) kecamatan

[69] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2018, Hlm, 5-6.
[70] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2016, Hlm, 47.

di Kabupaten Pasaman Barat. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 75.127 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 72.245 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 47.891 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 14.686 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman Barat.[71]

Pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 427.295 jiwa dengan komposisi 216.093 jiwa laki-laki dan 211.202 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (sebelas ) kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 77.167 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 74.137 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 48.824 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 14.900 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman Barat.[72]

**3. Keadaan Ekonomi**

Sektor Pertanian (pertanian, kehu-tanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015. Ini terlihat dari

[71] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2017, Hlm, 47.
[72] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2018, Hlm, 49.

kontri-businya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 111.247 jiwa dari penduduk yang bekerja. Diikuti oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebanyak 30.477 jiwa dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 12.962 jiwa. Status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh Buruh/ Karyawan/ Pegawai yaitu 40.257 jiwa.[73]

Pada tahun 2017 Sektor Pertanian (pertanian, kehu-tanan, perburuan dan perikanan) masih merupakan sektor paling dominan sebagai lapangan usaha penduduk Pasaman Barat. Ini terlihat dari kontri-businya dalam penyerapan tenaga kerja yang mencapai 99.473 jiwa dari penduduk yang bekerja. Diikuti oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebanyak 43.897 jiwa dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebanyak 21,784. . Status pekerjaan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh Buruh/ Karyawan/ Pegawai yaitu 49.039 jiwa.[74]

[73] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2016, Hlm, 49.
[74] Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Th, 2018, Hlm, 51.

## B. Hasil Pengolahan Data

### 1. Hasil Perhitungan Koefesien Gini

**Tabel 4.1**
**Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015**

| Kelompok Pengeluaran (1) | Jumlah Penduduk (2) | Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) (3) | %Komulatif Penduduk (Xk) (4) |
|---|---|---|---|
| <150000 | 0 | 0 | 0 |
| 150000-199999 | 0 | 0 | 0 |
| 200000-299999 | 4062 | 277012 | 0,009899904 |
| 300000-499999 | 48170 | 416386 | 0,127299802 |
| 500000-749999 | 109429 | 611777 | 0,394000102 |
| 750000-999999 | 84851 | 862974 | 0,600798914 |
| 1000000-149999 | 95602 | 1203785 | 0,833800057 |
| >1500000 | 68193 | 2434071 | 1 |
| | 410307 | 5806005 | |

Bersambung

| Jumlah Pengeluaran (5) | %Komulatif Pengeluaran (Yk) (6) | Xk-Xk-1 (7) | Yk+Yk-1 (8) | (Xk-Xk-1)* (Yk+Yk-1) (9) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125222744 | 0,002543315 | 0,009899904 | 0,002543315 | 2,51786e-05 |
| 20057313620 | 0,047878389 | 0,117399898 | 0,050421704 | 0,005919503 |
| 66946145333 | 0,199195189 | 0,2667003 | 0,247073578 | 0,065894597 |
| 73224206874 | 0,364702144 | 0,206798812 | 0,563897333 | 0,116613298 |
| 1,15084e+11 | 0,624824379 | 0,233001143 | 0,989526523 | 0,230560811 |
| 1,65987e+11 | 1 | 0,166199943 | 1,624824379 | 0,270045719 |
| 4,42424e+11 | | | | **0,689059107** |
| | | | G | **0,310940893** |

Menurut **Arsyad,** angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan ketidakmerataan tinggi, dan hasil

Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2015 menunjukkan hasi ketidakmerataan rendah yaitu 0,31

**Tabel 4.2**
**Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016**

| Kelompok Pengeluaran (1) | Jumlah Penduduk (2) | Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) (3) | %Komulatif Penduduk (Xk) (4) |
|---|---|---|---|
| 200000-299999 | 2764 | 277012 | 0,006600045 |
| 300000-499999 | 68723 | 416386 | 0,170700956 |
| 500000-749999 | 131415 | 611777 | 0,484501594 |
| 750000-999999 | 84678 | 862974 | 0,686700813 |
| 1000000-149999 | 82794 | 1203785 | 0,884401304 |
| >1500000 | 48411 | 2434071 | 1 |
| | **418785** | **5806005** | 3,232904712 |

Bersambung

| Jumlah Pengeluaran (5) | %Komulatif Pengeluaran (Yk) (6) | Xk-Xk-1 (7) | Yk+Yk-1 (8) | (Xk-Xk-1)* (Yk+Yk-1) (9) |
|---|---|---|---|---|
| 765661168 | 0,001912458 | 0 | 0 | 0 |
| 28615295078 | 0,073387346 | 0,164100911 | 0,075299804 | 0,012356766 |
| 80396674455 | 0,274201046 | 0,313800638 | 0,347588391 | 0,109073459 |
| 73074912372 | 0,45672655 | 0,202199219 | 0,730927596 | 0,147792989 |
| 99666175290 | 0,705671343 | 0,197700491 | 1,162397893 | 0,229806634 |
| 1,17836e+11 | 1 | 0,115598696 | 1,705671343 | 0,197173383 |
| 4,00355e+11 | | | | **0,696203232** |
| | | | G | **0,303796768** |

Menurut **Arsyad,** angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan ketidakmerataan tinggi, dan hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2016 menunjukkan hasi ketidakmerataan rendah yaitu 0,30

**Tabel 4.3**
**Hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017**

| Kelompok Pengeluaran (1) | Jumlah Penduduk (2) | Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan) (3) | %Komulatif Penduduk (Xk) (4) |
|---|---|---|---|
| 0-199999 | 0 | 0 | 0 |
| 200000-299999 | 7948 | 277012 | 0,018600733 |
| 300000-499999 | 61744 | 416386 | 0,163100434 |
| 500000-749999 | 139469 | 611777 | 0,489500228 |
| 750000-999999 | 101611 | 862974 | 0,727300811 |
| 1000000-149999 | 81015 | 1203785 | 0,916900502 |
| >1500000 | 35508 | 2434071 | 1 |
| | 427295 | 5806005 | |

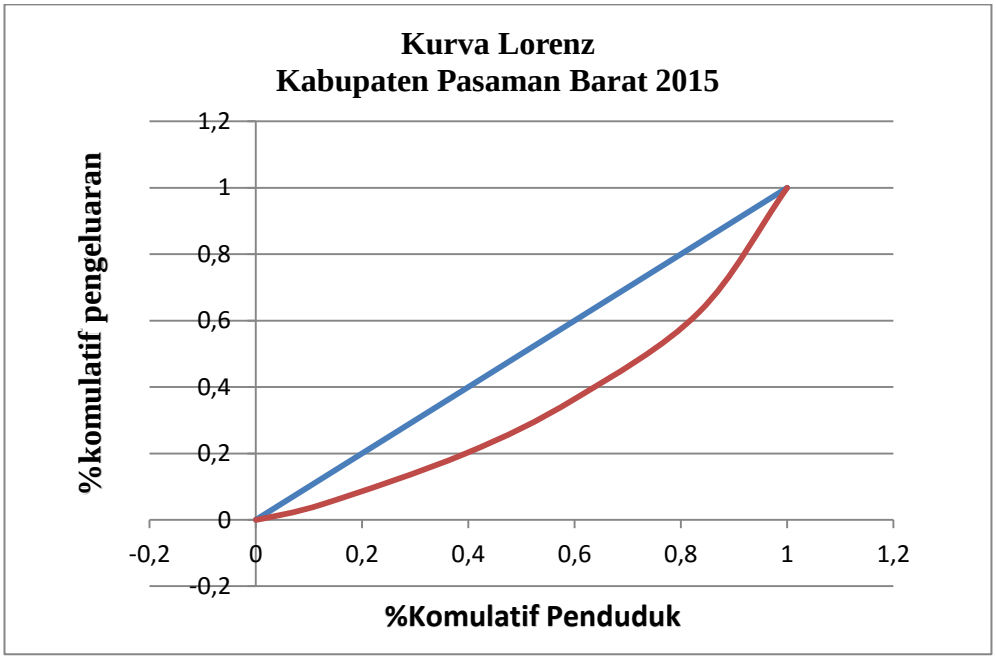
Bersambung

| Jumlah Pengeluaran (5) | %Komulatif Pengeluaran (Yk) (6) | Xk-Xk-1 (7) | Yk+Yk-1 (8) | (Xk-Xk-1)* (Yk+Yk-1) (9) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201691376 | 0,005720518 | 0,018600733 | 0,005720518 | 0,000106406 |
| 25709337184 | 0,07251949 | 0,144499702 | 0,078240007 | 0,011305658 |
| 85323926413 | 0,294211341 | 0,326399794 | 0,366730831 | 0,119700868 |
| 87687651114 | 0,522044711 | 0,237800583 | 0,816256052 | 0,194106165 |
| 97524641775 | 0,775436923 | 0,189599691 | 1,297481634 | 0,246002117 |
| 86428993068 | 1 | 0,083099498 | 1,775436923 | 0,147537917 |
| 3,84876e+11 | | | | **0,71875913** |
| | | | G | **0,28124087** |

Menurut **Arsyad,** angka Gini antara 0,2-0,35 merupakan ketidakmerataan rendah, angka Gini antara 0,36 – 0,49 merupakan ketidakmerataan sedang dan angka Gini antara 0,50-0,70 merupakan ketidakmerataan tinggi, dan hasil Perhitungan Koefesien Gini Kabupaten Pasaman Barat Pada Tahun 2017 menunjukkan hasi ketidakmerataan rendah yaitu 0,28

## 2. Gambar Kurva Lorenz

**Gambar 4.1**



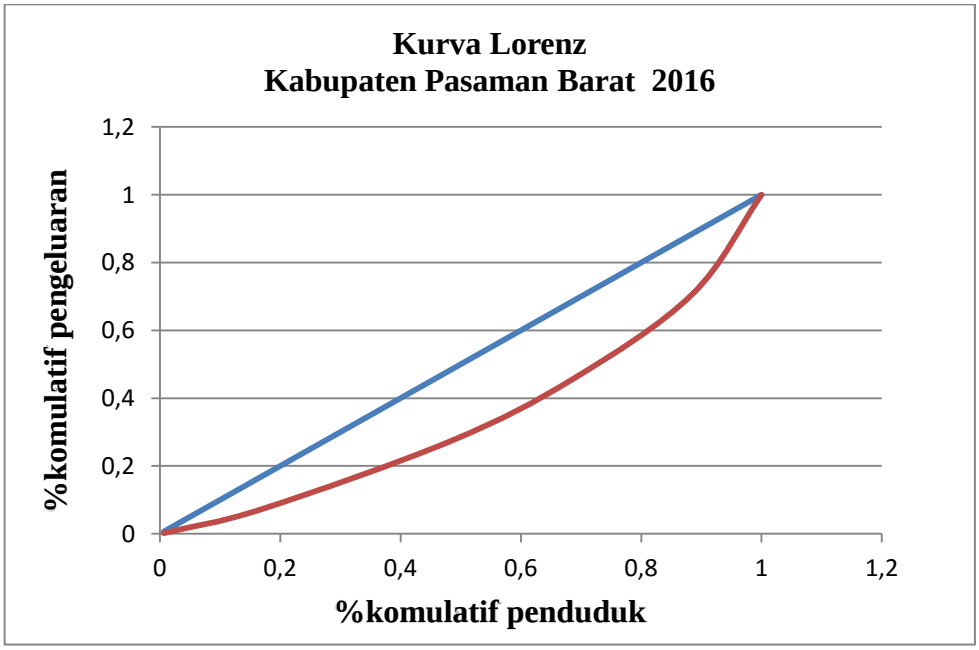

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa Kurva Lorenz yang menggambarkan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2015 terletak tidak jauh dari garis diagonal atau garis kemerataan. Letak kurva ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan distribusi yang rendah hal ini sejalan dengan angka koefesien gini yang cukup rendah yaitu 0,31.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan hubungan antara persentase komulatif penduduk dengan persentase komulatif pengeluaran. Bahwa pada golongan pengeluaran ( 200.000-299.999) terdapat 4.062 jiwa penduduk atau setara dengan 0,99% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015

memiliki pengeluaran sebesar 1.125.222.744 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2015. Pada golongan pengeluaran (300.000-499.999) terdapat 48.170 jiwa penduduk atau setara dengan 11,74% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015, memiliki pengeluaran sebesar 20.057.313.620 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2015. Pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) terdapat 109.429 jiwa penduduk atau setara dengan 26,67% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015, memeliki pengeluaran sebesar 66.946.145.333 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2015. Pada golongan (750.000-999.999) terdapat 84.851 penduduk atau setara dengan 20,68% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015, memiliki pengeluaran sebesar 73.224.206.874 per bulan dari total pengeluaran penduduk pada tahun 2015. Pada golongan pengeluarn (1.000.000-1.499.999) terdapat 95.602 jiwa penduduk atau setara dengan 23,30% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015, memiliki pengeluaran sebesar 115.084.253.570 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk pada tahun 2015. Dan untuk pengeluaran (>1.500.000) terdapat 68.193 jiwa penduduk atau setara dengan 16,62% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015, memiliki pengeluaran sebesar 165.986.603.703 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015. Untuk persentase penduduk terbesar pada tahun 2015 berada pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) yaitu sebesar 26,67% atau setara dengan 109.429 jiwa penduduk Pasaman Barat dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2015 yaitu sebesar 410.307 jiwa penduduk. Dan untuk

persentase pengeluaran penduduk terbesar pada tahun 2015 berada pada golongan pengeluaran (>1.500.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar 165.986.603.703 per bulan dari total jumlah pengeluaran penduduk pada tahun 2015 yaitu sebesar 442.423.745.844

**Gambar 4.2**




Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa Kurva Lorenz yang menggambarkan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2016 terletak tidak jauh dari garis diagonal atau garis kemerataan. Letak kurva ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan distribusi yang rendah hal

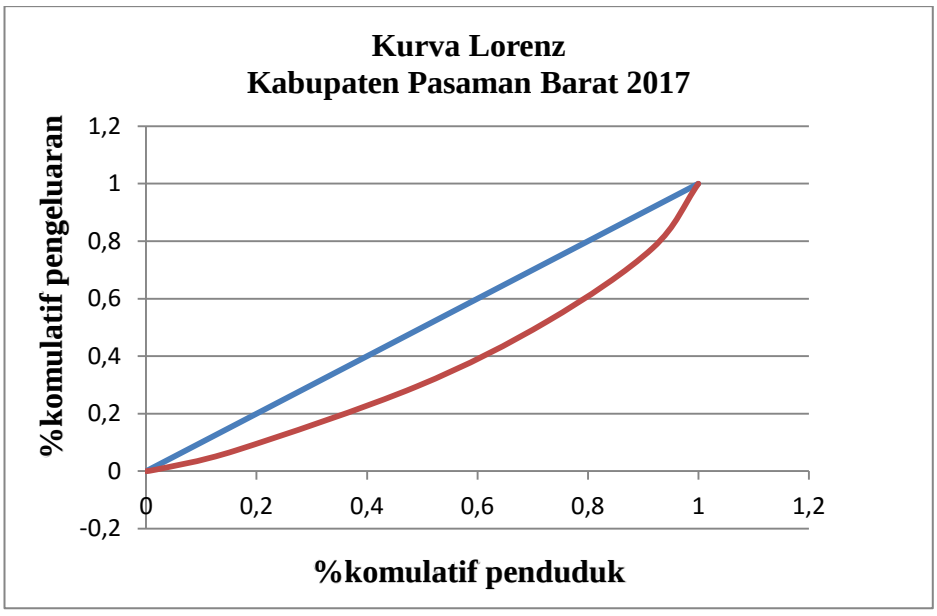
ini sejalan dengan angka koefesien gini yang cukup rendah yaitu 0,30 dan angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu 0,30.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan hubungan antara persentase komulatif penduduk dengan persentase komulatif pengeluaran. Bahwa pada

golongan pengeluaran ( 200.000-299.999) terdapat 2.764 jiwa penduduk atau setara dengan 0,66% dari total jumlah penduduk  Pasaman Barat pada tahun 2016 memiliki pengeluaran sebesar 765.661.186 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2016. Pada golongan penegluaran (300.000-499.999) terdapat 68.723 jiwa penduduk atau setara dengan 16,41% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016, memiliki pengeluaran sebesar 28.615.295.078 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2016. Pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) terdapat 131.415 jiwa penduduk atau setara dengan 31,38% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016, memeliki pengeluaran sebesar 80.396.674.455 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2016. Pada golongan (750.000-999.999) terdapat 84.678 penduduk atau setara dengan 20,22% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016, memiliki pengeluaran sebesar 0 73.074.912.372 per bulan dari total pengeluaran penduduk pada tahun 2016. Pada golongan pengeluarn (1.000.000-1.499.999) terdapat 82,794 jiwa penduduk atau setara dengan 19,77% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016, memiliki pengeluaran sebesar 99.666.175.290 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk pada tahun 2016. Dan untuk pengeluaran (>1.500.000) terdapat 48.411 penduduk atau setara dengan 11,56% dari total jumlah penduduk pasaman barat pada tahun 2016, memiliki pengeluaran sebesar 117.835.811.181 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016. Untuk persentase penduduk terbesar pada tahun 2016

terdapat pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) yaitu sebesar 31,38% atau setara dengan 131.415 jiwa penduduk Pasaman Barat dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2016 yaitu sebesar 418.785 jiwa penduduk. Dan untuk persentase pengeluaran penduduk terbesar pada tahun 2016 berada pada golongan pengeluaran (>1.500.000) dengan jumlah pengeluaran sebesar 117.835.811.181 per bulan dari total jumlah pengeluaran penduduk pada tahun 2016 yaitu sebesar 400.354.529.544.

**Gambar 4.3**




Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kurva lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2017 terletak tidak jauh dari garis diagonal atau garis kemerataan. Letak kurva ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan distribusi yang

rendah hal ini sejalan dengan angka koefesien gini yang cukup rendah yaitu 0,28 jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 0,30.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan hubungan antara persentase komulatif penduduk dengan persentase komulatif pengeluaran. Bahwa pada golongan pengeluaran ( 200.000-299.999) terdapat 7.948 jiwa penduduk atau setara dengan 1,86% dari total penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memiliki pengeluaran sebesar 2.201.691.376 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2017. Pada golongan pengeluaran (300.000-499.999) terdapat 61.744 jiwa penduduk atau setara dengan 14,45% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memiliki pengeluaran sebesar 25.709.337.184 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2017. Pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) terdapat 139.469 jiwa penduduk atau setara dengan 32,64% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memeliki pengeluaran sebesar 85.323.926.413 per bulan dari total pengeluaran penduduk per bulan pada tahun 2017. Pada golongan (750.000-999.999) terdapat 101.611 penduduk atau setara dengan 23,78% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memiliki pengeluaran sebesar 87.687.651.114 per bulan dari total pengeluaran penduduk pada tahun 2017. Pada golongan pengeluarn (1.000.000-1.499.999) terdapat 81.015 jiwa penduduk atau setara dengan 18,96% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memiliki pengeluaran sebesar 97.524.641.775 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk pada tahun 2017. Dan untuk pengeluaran (>1.500.000) terdapat

35.508 penduduk atau setara dengan 8,31% dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017, memiliki pengeluaran sebesar 86.428.993.068 per bulan dari total pengeluaran per bulan penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017. Untuk persentase penduduk terbesar pada tahun 2017 terdapat pada golongan pengeluaran (500.000-749.999) yaitu sebesar 32,64% atau setara dengan 139.469 jiwa penduduk Pasaman Barat dari total jumlah penduduk Pasaman Barat pada tahun 2017 yaitu sebesar 427.295 jiwa penduduk. Dan untuk persentase pengeluaran penduduk terbesar pada tahun 2017 berada pada golongan pengeluaran (1000.000-1.499.999) dengan jumlah pengeluaran sebesar 97.524.641.775 per bulan dari total jumlah pengeluaran penduduk pada tahun 2017 yaitu sebesar 384.876.240.930.

## C. Analisis Penulis

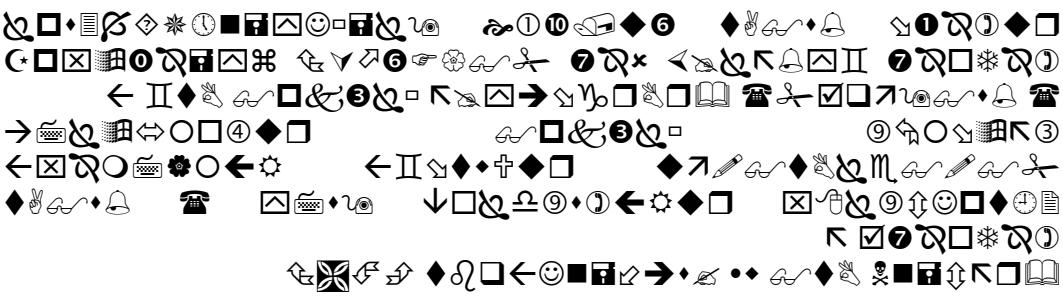
1. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015-2017.
    a. Pada tahun 2015 hasil perhitungan Koefesien Gini Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 0,31. Angka ini menunjukkan tingkat ketidakmerataan distribusi yang rendah yang mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sejahtera.
    b. Pada tahun 2016 hasil perhitungan Koefesien Gini Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 0,30 angka ini mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun 2015. Hasil ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan

kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2015.

c. Pada tahun 2017 hasil perhitungan Koefesien Gini Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yaitu 0,28 angka ini mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun 2016. Hasil ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2016.

2. Distribusi Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Manusia hidup didunia diberikan tugas dan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi dalam QS Al-Baqarah: 30.

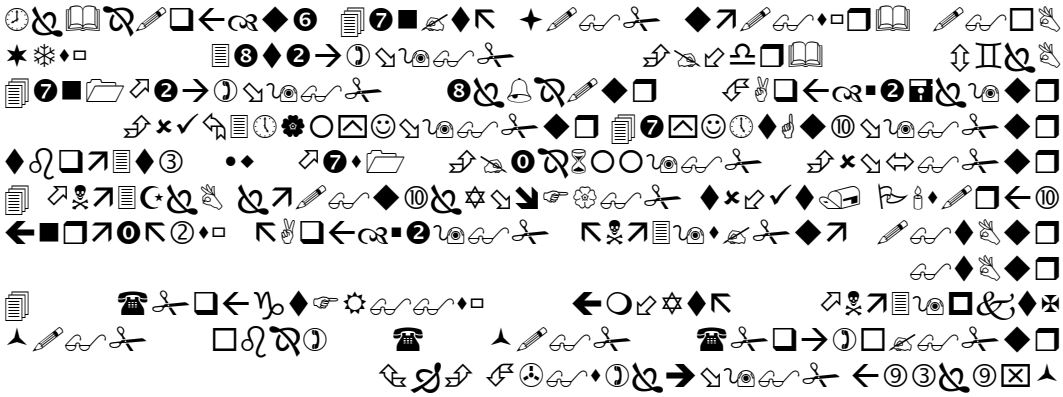


Artinya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Hal ini didukung dengan fitrah manusia yang dianugerahkan dengan berbagai perbedaan skill dan kemampuan. Perbedaan dan kesenjangan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang natural. Terjadinya kesenjangan ini karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Berbeda dari sisi kemampuan, ras, suku bangsa, bahasa, bakat, minat, keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan ini tentu akan melahirkan perbedaan dari sisi kinerja dan performa sebagai manusia.

Dalam Qs Al-Hasyr ayat 7



Artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

telah dijelaskan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam

menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.

Selain kewajiban membayar zakat, infak, sedekah, wakaf hibah, wasiat, dan lain sebagainya yang berdimensi sosial. islam juga memberlakukan sistem distribusi pendapatan yang berdimensi komersial, berlangsung melalui proses ekonomi, diantaranya gaji bagi para pekerja biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melaui proses mudharabah maupun profit sharing (bagi hasil) untuk modal dana melaui profit musyarakah.

Distribusi Pendapatan Masyarakat dilihat dari Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Tahun 2015-2017 di Kabupaten Pasaman Barat, dari hasil perhitungan Koefesien Gini dan Kurva Lorenz sebagai berikut:

a. Pada tahun 2015 hasil perhitungan Koefesien Gini 0,31 memperlihatkan ketidak merataan rendah
b. Pada tahun 2016 hasil perhitungan Koefesien Gini 0,30 memperlihatkan ketidak merataan rendah

c. Pada tahun 2017 hasil perhitungan Koefesien Gini 0,28 memperlihatkan ketidak merataan rendah

Berdasarkan hasil perhitungan Koefesien Gini, Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015-2017 tergolong kepada ketidakmerataan rendah dan islam memandang ketidakmertaan ini adalah sebagai hal yang wajar karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Berbeda dari sisi kemampuan, ras, suku bangsa, bahasa, bakat, minat, keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan ini tentu akan melahirkan perbedaan dari sisi kinerja dan performa sebagai manusia, untuk mempertahankan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang rendah di Kabupaten Pasaman Barat maka dalam islam diberlakukan sistem distribusi pendapatan yang berdimensi sosial dan distribusi pendapatan berdimensi komersial.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian. Distribusi Pendapatan Masyarakat dilihat dari Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan Pada Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Pasaman Barat, tergolong pada ketidakmeratan rendah, ketidakmerataan distribusi pendapatan ini terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dengan angka Gini pada tahun 2015, 0,31, pada tahun 2016 , 0,30 dan pada tahun 2017, 0,28.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan hasil perhitungan angka Gini pada tahun 2015 sebesar 0,31, pada tahun 2016 sebesar 0,30 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,01%, dan pada ahun 2017 sebesar 0,28 mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya.
3. Menurut Perspektif Ekonomi Islam dari hasil penelitian yang dilakukan, Islam memandang bahwa tingkat ketidakmeratan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai hal yang wajar dengan hasil penelitian ketidakmeratan rendah karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Berbeda dari sisi kemampuan, ras, suku bangsa, bahasa, bakat, minat, keterampilan, dan

lain-lain. Perbedaan ini tentu akan melahirkan perbedaan dari sisi kinerja dan performa sebagai manusia.

B. Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, maka penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

   Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan kebijkan dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat seperti kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diterapkan pada tahun 2015 sampai 2017 sehingga distribusi penda patan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat terus mengalami pemerataan.

2. Bagi Masyarakat

   Bagi Masyarakat gologan kaya, diharapkan untuk dapat mendistribusikan kekayaan yang dimiliki kepada masyarakat lain yang membutuhkan, melalui sistim distribusi pendapatan dalam islam yaitu sistim distribusi yang berdimensi sosial seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, wasiat dan lain sebagainya melalui peranan lembaga Amil Zakat Nasional supaya bisa terdistribusikan secara adil dan merata, dan sistim distribusi yang berdimensi komersial, seperti melalui proses ekonomi, profit atau keuntungan untuk pihak yang

menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melaui proses mudharabah maupun profit sharing (bagi hasil) untuk modal dana melaui profit musyarakah.

3. Bagi Akademisi

   Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Distribusi pendapatan masyarakat.

# Daftar Pustaka


Adisasmita, Rahardjo, 2013, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Beik, Irfan Syauqi, Dkk, 2017, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Fauzia, Ika Yunia, dkk, 2014, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Jakarta: Prenada Media Group

Ghofur, Abdul, *2017, Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers.

Hakim, Lukman, 2012, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Geloran Aksara Pratama.

Huda, Nurul, *2015, Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group.

Munandar, Haris, 2000, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Naf'an, 2014 *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Putong, Iskandar, 2013, *Pengantar Mikro Dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rosyidi, Suherman, 2014, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro,* Jakarta: Raja Wali Pers.

Sanusi, Bachrawi, 2004, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Siregar, Hermanto dkk, *Modul 1 Pembangunan Ekonomi Berencana*.

Sudarsono, dkk, 1994, *Kamus Besar Ekonomi Uang Dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukirno, Sadono, 2013, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amri, Khairul, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan: Panel Data 8 Provinsi Di Sumatera,* Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi, Volume 1 No 1 Tahun 201.

Awandari, Luh Putu Putri dkk, 2016, *Pengaruh Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*, E-Jurnal EP Unud, Vol 5. No 12, ISSN: 2303-0178.

Damanik, Anggia Mugabe, 2018, Dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi*, E-Jurnal *Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* Volume 7 No 1, Januari-April ISSN: 2303-1255 (Online).

Dengah, Stefandy, 2014, *Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Perumahan Kota Manado Tahun 2003-2012*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi, Volume 14 No 3.

Hariadi, Pramono, 2008, *Jurnal Ekonomi Pembangunan"Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah*".

Hariadi, Pramono, 2008, *Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Banyumas Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembang.

Iswanto, Denny, *2015, Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Ekonomi,. Vol 4, N0 1.

Kalalo, Tiffany, Dkk, *2016, Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara,* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 01.

Khakim, Luqman *dkk,* 2011, *Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat,* Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2.

Rosni, 2017, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol 9, No 1, e-ISSN: 2549-7057|P- ISSN: 2085-8167.

Sipayung, Artha Novelia dkk, 2015, *QE Journal, Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumahtangga* (Studi Kasus: Kecamatan Percut Sei Tuan) | Vol.04 - No.03 September

Sugiyarto, Dkk, 2015, *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro,* Agro Ekonomi Vol. 26/No. 2.

Wahyuni Dkk, 2012, *Jurnal Analisis Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Gapoktan Tunas Berduri Penerima Dana PUAP di Desa KUALU NANAS Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*, ISSN 2087-409X.

Zakiyah, Kuni, 2017, *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam*), Journal Of Islamic Economic, Vol. 2, No. 1,

Hamid, Muh, 2017. Skripsi : *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat*, Uin Alauddin Makassar.

Marsanti, Retno, 2007, Skripsi*: Analisis Distribusi Pendapatan Sektor Industri Kecil Studi Kasus Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten*, Universitas Sanata Dharma.

Putra, Linggar Dewanggara, 2011, Skripsi: *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007,* Universitas Diponegoro Semarang.

Bappeda Pasaman Barat.go.id.

Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2016.

Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2017.

Naskah Publikasi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2018.

Naskah Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angkat Tahun 2017.

Naskah Publikasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Angkat Tahun 2018.